



## **IMPLIKASI POLITIK DAN EKONOMI TERHADAP KERJA SAMA PERDAGANGAN ANTARNEGARA ASEAN MENGGUNAKAN MATA UANG RESMI ASEAN**

Remeiliza Fitri

(Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Email: [remeiliza.fitri@gmail.com](mailto:remeiliza.fitri@gmail.com)

Diterima : 03-03-2024

Direvisi : 12-03-2024

Dipublikasi : 10-04-2024

### ***Abstract***

*This research investigates the impact of economic trade cooperation among ASEAN countries with the introduction of the official ASEAN currency. This regional currency is considered crucial in facilitating economic integration in ASEAN, even though it faces significant challenges, especially in terms of varying economic stability among member countries. By combining political and economic analysis, this study aims to provide a better understanding of the implications of the implementation of the ASEAN single currency on trade dynamics and overall regional stability.*

**Keywords:** ASEAN Trade Cooperation, ASEAN Currency, Political and Economic Implications.

## PENDAHULUAN

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di tengah situasi regional yang tidak stabil. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Sekarang ASEAN sudah berjumlah 11 negara anggota disusul Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste.

Meski masing-masing negara anggota berbeda satu dengan yang lain dalam hal bahasa, budaya, agama, demografi, geografi, etnisitas, dan pengalaman sejarah, hubungan antaranggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Perjanjian persahabatan dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN yang pada tahun 1967 di Bali disebut sebagai perwujudan dari nilai-nilai global yang mendasari pembentukan organisasi regional.

Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan solidaritas, kohesivitas, dan efektifitas kerja sama. Kegiatan kerja sama dalam ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerja sama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerja sama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 (tiga) pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*).

Ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain dan saling memperkuat tujuan pencapaian perdamaian yang berkelanjutan, stabilitas, serta pemerataan kesejahteraan di kawasan. Di dalam pernyataan ASEAN Concord II pada poin ke tiga tentang masyarakat ekonomi ASEAN merumuskan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keragaman yang menjadi ciri khas daerah menjadi peluang bagi komplementasi bisnis membuat ASEAN segmen lebih dinamis dan lebih kuat dari rantai pasokan global.

Strategi ASEAN terdiri dari integrasi ASEAN dan meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN. Dalam pergerakan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain mekanisme lembaga baru dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan inisiatif yang ada ekonomi termasuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (AFAS) dan Kawasan Investasi ASEAN (AIA), mempercepat integrasi regional dalam sektor-sektor prioritas, memfasilitasi pergerakan orang bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat, serta memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, termasuk perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN yang ada untuk memastikan resolusi cepat dan mengikat secara hukum dari ekonomi perselisihan. Sebagai langkah pertama menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN harus melaksanakan rekomendasi dari Tingkat Satuan Tugas Integrasi Ekonomi ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari rumusan poin ke tiga itu maka Masyarakat Ekonomi ASEAN didasarkan pada konvergensi kepentingan diantara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas upaya integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan jadwal waktu yang jelas. Salah satu inisiatif baru yang baru menjadi isu adalah penggunaan mata uang lokal dalam ASEAN dan ASEAN plus yaitu Jepang, Korea, dan China.

Di dalam *Hanoi of Plan* mengatakan secara jelas terhadap visi dan misi ASEAN sebagai pendukung resmi ASEAN Concord II yaitu, “Dalam pengakuan atas kebutuhan untuk mengatasi

situasi ekonomi saat ini di wilayah tersebut, ASEAN harus melaksanakan inisiatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mengatasi dampak sosial dari krisis ekonomi dan keuangan global. Langkah-langkah ini menegaskan komitmen ASEAN untuk integrasi regional lebih dekat dan diarahkan untuk mengkonsolidasi dan memperkuat fundamental ekonomi negara anggota”.

Salah satunya adalah memperkuat kerja sama dan keuangan makroekonomi dengan cara mengembangkan pasar keuangan dalam dan cairan untuk memungkinkan pemerintah dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pendanaan jangka panjang dalam mata uang lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pada keuangan atas bank dan membatasi risiko krisis keuangan. Kerja sama perdagangan ekonomi di antara negara-negara ASEAN telah mengalami perkembangan signifikan sejak pembentukannya.

ASEAN bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, integrasi regional, dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara melalui berbagai inisiatif, termasuk pendekatan terhadap pembentukan mata uang regional. Salah satu langkah integrasi lebih lanjut, pembentukan mata uang resmi ASEAN menjadi topik yang semakin relevan dan penting untuk dipelajari. Meskipun upaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan di antara negara-negara ASEAN terus dilakukan. Pertanyaan mengenai efektivitas dan dampak dari pengenalan mata uang resmi ASEAN masih menjadi perdebatan yang hangat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak politik dan ekonomi dari adopsi mata uang resmi ASEAN terhadap kerja sama perdagangan ekonomi di kawasan ini. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi kelebihan dan tantangan yang terkait dengan implementasi mata uang resmi ASEAN, terutama mengingat disparitas ekonomi antara negara-negara anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki seberapa pentingnya mata uang resmi ASEAN dalam memfasilitasi integrasi ekonomi diantara negara-negara anggota ASEAN. Fokus pada implikasi politik dan ekonomi dari adopsi mata uang resmi ASEAN, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prospek integrasi ekonomi di kawasan pertemuan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika perdagangan ekonomi di ASEAN. Implikasi politik dan ekonomi dari pendekatan ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas regional tetapi juga memiliki dampak global yang lebih luas. Dengan memperluas wawasan tentang proses integrasi regional di ASEAN melalui mata uang resmi, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan kerja sama ekonomi dan stabilitas di Asia Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak kerja sama perdagangan ekonomi diantara negara-negara ASEAN dengan adanya mata uang resmi ASEAN. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang perspektif politik dan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa langkah yang sistematis dan terstruktur. Data dikumpulkan melalui pencarian yang sistematis dalam berbagai basis data akademis dan perpustakaan digital, melibatkan jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Setiap sumber data dievaluasi untuk memastikan keakuratan, relevansi, dan keandalannya.

Melalui pemanfaatan sumber data, peneliti akan mengumpulkan informasi terbaru dan terpercaya tentang dampak kerja sama perdagangan ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan adanya mata uang resmi ASEAN secara politis dan ekonomis. Analisis data akan dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan temuan dari literatur terpilih untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam serta wawasan yang berharga mengenai topik penelitian ini

Literatur yang dipilih mencakup berbagai sudut pandang untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang penelitian ini. Data dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai temuan dari literatur yang dipilih. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari kerja sama perdagangan ekonomi serta penggunaan mata uang resmi ASEAN. Hasil analisis digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan wawasan yang berharga mengenai dampak politik dan ekonomi dari kerja sama perdagangan antar negara ASEAN dengan adanya mata uang resmi ASEAN. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait mata uang resmi ASEAN.

## **PEMBAHASAN**

Globalisasi ekonomi telah merubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Demikian pula halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dewasa ini ASEAN tumbuh sebagai wadah integrasi ekonomi dengan pasar potensial, yang pengaruhnya berdampak pada peningkatan kerja sama ekonomi yang semakin luas terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Integrasi ekonomi ASEAN menghadapi tantangan besar karena negara-negara ASEAN memiliki sistem ekonomi, pendapatan per-kapita, tingkat pembangunan ekonomi dan institusi serta kondisi sosial yang berbeda dan heterogen. Perbedaan dan heterogenitas menyebabkan beberapa negara yang tidak memiliki infrastruktur dan kapasitas institusional yang memadai mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan negara yang lain.

Salah satu kondisi yang memiliki perbedaan dan heterogenitas adalah mata uang. Implikasi dari hal ini adalah, munculah wacana pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan visi ASEAN Tahun 2020. MEA bertujuan untuk membentuk suatu pasar tunggal diarahkan pada penerapan mata uang tunggal (*single currency*) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas mata uang regional dalam pelaksanaan pasar tunggal di ASEAN, yang rencananya dapat dimulai pada tahun 2025.

Rencana munculnya mata uang tunggal tersebut tercetus dalam forum ASEAN *Community* yang sudah disepakati menjadi ASEAN Vision 2020. ASEAN *Community* sendiri yang dimaksudkan akan dibangun berdasarkan tiga pilar, yakni ASEAN *Security Community* (ASC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Cultur Community* (ASCC). Integrasi ekonomi di sebuah kawasan pada dasarnya tidak perlu selalu berujung pada penerapan mata uang tunggal di kawasan yang bersangkutan. Harmonisasi kebijakan perdagangan dan koordinasi kebijakan perekonomian dalam sebuah kawasan dapat dilakukan tanpa hadirnya mata uang tunggal. Secara ideal, penerapan mata uang tunggal hanya akan menjadi relevan jika kawasan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh teori kawasan mata uang tunggal optimum (*Optimum Currency Area*), yang meliputi kecukupan prakondisi

politik dan standar kriteria ekonomi tertentu, yang akan dibahas kemudian dalam penelitian ini.

Namun karena pentingnya kepastian nilai tukar dalam perekonomian global menyebabkan kebutuhan integrasi ekonomi tidak lagi hanya berupa integrasi perdagangan namun berkembang menjadi integrasi keuangan. Integrasi keuangan secara penuh terjadi pada saat masing-masing negara dalam kawasan tersebut telah menghadapi kebijakan yang sama dalam keuangan (*Single Set of Rules*), di mana investor dan penerbit aset keuangan mempunyai akses yang sama terhadap pasar keuangan (*Equal Access*) dan diperlakukan secara sama (*Treated Equally*) ketika beroperasi di sektor keuangan.

Ada beberapa manfaat yang mungkin dapat diperoleh bagi negara-negara ASEAN, sehubungan dengan penerapan mata uang tunggal (*Single Currency*) di ASEAN, yang rencananya akan dimulai pada 2015. *Pertama*, melalui penetapan mata uang tunggal, diharapkan agar anggota ASEAN dan SDM di dalamnya dapat lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan perekonomian anggotanya, yang indikasinya tercermin melalui (i) berkurangnya biaya transaksi perdagangan antar negara anggota melalui hilangnya ongkos transaksi mata uang dan risiko nilai tukar yang umumnya mengikuti proses pembayaran dalam transaksi perdagangan antar negara, (ii) meningkatnya transparansi harga dari sebuah produk yang dihasilkan oleh negara-negara berbeda yang ada di kawasan mata uang tunggal yang bersangkutan.

Keuntungan lain yang juga diperoleh adalah berkurangnya ongkos pengelolaan kebijakan moneter dari negara-negara kawasan mata uang tunggal tersebut. Hal ini terkait dengan terpusatnya pengelolaan kebijakan moneter untuk setiap negara anggota ASEAN. Di samping itu, penerapan mata uang tunggal memberikan kredibilitas dan disiplin pengelolaan kebijakan ekonomi makro bagi negara-negara anggotanya. Diharapkan agar proses penetapan sistem uang tunggal (*Single Currency*) tersebut, tidak merujuk pada Uni Eropa sebagai acuan rencana, karena diketahui bahwa struktur ekonomi, politik, dan sosial negara-negara anggota ASEAN tidak sama dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Acuan dari sistem ini lebih kepada penguatan pasar bersama bagi ASEAN ataupun menjadikan ASEAN sebagai basis produksi untuk berbagai industri.

Dewasa ini ASEAN tumbuh sebagai wadah integrasi ekonomi dengan pasar potensial, yang pengaruhnya berdampak pada peningkatan kerja sama ekonomi yang semakin luas. Sistem ekonomi, pendapatan per-kapita, infrastruktur, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan institusi serta kondisi sosial yang berbeda merupakan beberapa alasan yang menjadi kendala pada realisasi integrasi ekonomi yang salah satunya hendak diwujudkan dengan penggunaan mata uang tunggal ASEAN.

Pada dasarnya penggunaan mata uang tunggal memiliki beberapa manfaat yang mampu membawa peningkatan perekonomian negara-negara pengguna mata uang tersebut agar lebih mapan. Melalui penetapan mata uang tunggal dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam upaya peningkatan perekonomian negara yang tercermin melalui berkurangnya biaya transaksi perdagangan antar negara anggota melalui hilangnya ongkos transaksi mata uang dan risiko nilai tukar yang umumnya mengikuti proses pembayaran dalam transaksi perdagangan antar negara, serta meningkatnya transparansi harga dari sebuah produk yang dihasilkan oleh negara-negara berbeda yang ada di kawasan mata uang tunggal yang bersangkutan. Selain itu akan berkurangnya biaya transaksi perdagangan antarnegara anggota serta memberikan kredibilitas dan disiplin pengelolaan kebijakan ekonomi makro bagi negara-negara anggota ASEAN.

Melalui mata uang tunggal di suatu regional tentu membuka peluang besar kepada para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut karena tidak perlu cemas terhadap fluktuasi kurs mata uang. Disisi lain untuk negara-negara dengan produktivitas lemah akan selalu menjadi negara konsumen tanpa pernah bisa menjual barangnya karena tingkat harga yang tinggi. Idealnya, penerapan mata uang tunggal hanya akan relevan jika kawasan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan oleh teori kawasan mata uang tunggal optimum (*Optimum Currency Area*) yang meliputi kecukupan prakondisi politik dan standar kriteria ekonomi tertentu. Namun layak tidaknya sebuah sistem nilai tukar yang akan dipakai tergantung dari kesiapan perekonomian kawasan tersebut untuk memenuhi syarat-syarat yang tertera pada kriteria utama *Optimum Currency Area*. Karena itu, perlu beberapa analisis yang memberikan gambaran tentang kelayakan kawasan ASEAN untuk diterapkannya sistem *Optimum Currency Area* tersebut.

Dari teori kawasan mata uang tunggal optimum tersebut memiliki keuntungan dan kelebihannya antara lain;

1. Hilangnya ketakutan investor asing terhadap perubahan kurs.
2. Arus distribusi perdagangan yang cepat.
3. Sistem nilai tukar yang lebih stabil. Nilai tukar akan lebih stabil dikarenakan negaranegara secara bersama-sama dalam mengatur kebijakan moneternya, sehingga ketahanan dan stabilitas moneter terutama nilai tukarnya lebih baik.
4. Pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Kerugian diterapkannya *Optimum Currency Area*;

1. Hilangnya kebebasan moneter Bank Sentral di masing-masing negara sehingga tidak dapat menjalankan kebijakan moneternya dikarenakan dalam *Optimum Currency Area* kebijaksanaan moneter diambil secara bersama-sama dan dibawah oleh suatu lembaga yang dipilih.
2. Hilangnya mata uang nasional suatu bangsa. Melalui penggunaan mata uang tunggal maka negara-negara yang menerapkannya harus bersedia memakai mata uang tunggal sebagai alat tukar yang sah dan melepaskan kemungkinan penyesuaian nilai tukar nominal sebagai respon terhadap gejolak perekonomian makro. Ketika kita berbicara tentang integrasi ekonomi, diperlukan kepastian nilai tukar yang menjadi penting di era global saat ini. Sehingga kebutuhan integrasi ekonomi bukan hanya berupa integrasi perdagangan tetapi juga berkaitan erat dengan integrasi keuangan. Ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota untuk merealisasikan mata uang tunggal ASEAN yaitu harus memiliki sistem ekonomi yang sejenis dan juga tingkat perkembangan yang tidak boleh terlalu jauh. Selain komitmen, transparansi dan informasi terkait perkembangan perekonomian masing-masing negara.

Komitmen dan transparansi inilah yang menjadi beberapa penyebab keruntuhan perekonomian negara-negara di kawasan Eropa. Pada tahun 1998, kesepakatan syarat bergabung bukan berdasarkan pada aspek ekonomi melainkan pada aspek politik sehingga terjadi kelonggaran pemenuhan persyaratan. Selain menimbang kesiapan secara internal, tentu ASEAN harus belajar banyak pada Uni Eropa yang dijadikan sebagai model percontohan

penerapan mata uang tunggal untuk kawasan lain. Di mana otoritas kebijakan moneter Uni Eropa dikelola oleh Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*) dengan demikian tugas pengelolaan kebijakan moneter setiap negara hilang. Bank Sentral di setiap negara hanya berfungsi layaknya kantor cabang.

Hilangnya kendali negara atas kebijakan moneter bisa dikatakan sebagai ongkos yang harus dibayar untuk penetapan sistem mata uang tunggal yang berimplikasi pada berkurangnya instrumen untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan ekonomi domestik negaranya. Bahkan penerapan kebijakan moneter tersebut secara kolektif bisa menimbulkan hambatan pengelolaan kebijakan fiskal tiap negara anggota. Yang mana kebijakan fiskal negara-negara anggota Uni Eropa tidak diakomodasi oleh Uni Eropa. Sehingga dalam pengambilan suatu kebijakan fiskal pada negara tidak boleh mengganggu kestabilan moneter regional.

Jika nantinya ASEAN sudah mampu merealisasikan intergrasi perdagangan dan perekonomian bukan tidak mungkin penggunaan mata uang tunggal merupakan bentuk kerja sama integrasi regional yang paling tinggi. Untuk dapat merealisasikannya perlu usaha dengan memperkecil kesenjangan pembangunan infrastruktur regional. Penyatuan mata uang merupakan itikad yang baik, namun perwujudannya harus melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan hal itu dapat diwujudkan.

Meskipun memiliki berbagai keuntungan, namun perwujudan pembentukan mata uang tunggal ASEAN masih memiliki berbagai kendala, diantaranya masih beragamnya kondisi perekonomian negara-negara ASEAN. Upaya untuk perwujudan penyatuan mata uang ini harus didahului oleh pemaksimalan peran dari pembentukan MEA. Selain itu untuk dapat mewujudkannya, harus terdapat kesatuan tekad antara negara-negara anggota ASEAN sehingga infrastruktur untuk terbentuknya mata uang tunggal ASEAN dapat terwujud.

## **KESIMPULAN**

Penyatuan mata uang adalah langkah yang positif, namun harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan realisasinya. Meskipun memiliki banyak keuntungan, pembentukan mata uang tunggal ASEAN masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keragaman kondisi perekonomian negara-negara ASEAN. Upaya untuk mewujudkan penyatuan mata uang ini harus diawali dengan maksimalisasi peran pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kesatuan tekad dari negara-negara anggota ASEAN agar infrastruktur untuk mata uang tunggal ASEAN dapat terbentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A., & Chan, Y. K. (2021). "Political and Economic Implications of ASEAN Monetary Integration." *Journal of International Economics and Economic Policy*, 18 (4).  
Blue Print Asean Economic Community. Departemen Perdagangan Republik Indonesia Lieven Baele. 2004.
- Chowdhury, I., & Islam, M. S. (2020). "ASEAN Economic Community and the Prospect of a Single Currency: An Empirical Analysis." *Journal of Economic Integration*, 35 (1).
- European Central Bank Mundell, R.A. (1961) A Theory of Optimum Currency Areas. *The American Economic Review*, 51.
- Lai, J. T., & Wong, K. H. (2022). "Assessing the Readiness for ASEAN Monetary Union: A Multi-dimensional Approach." *ASEAN Economic Bulletin*, 39 (1).
- MEASURING FINANCIAL INTEGRATION IN THE EURO AREA. OCCASIONAL PAPER SERIES NO. 14 / APRIL 2004.
- Nguyen, T. D., & Nguyen, T. P. (2019). "Economic Integration in ASEAN: The Role of Regional Currency." *Journal of Southeast Asian Economies*, 36 (2).
- Phan, C. H., & Vo, D. H. (2018). "Benefits and Barriers of Single Currency Adoption in ASEAN." *International Journal of Economics and Finance*, 10 (3).
- Rahman, M. M., & Ahmed, M. (2020). "Economic Disparities in ASEAN and the Feasibility of a Common Currency." *Journal of Economic Studies*, 47 (6).
- Shimizu, K., & Hiratsuka, D. (2019). "Macroeconomic Divergence and Challenges in the ASEAN Monetary Union." *Journal of Asian Economics*, 53.
- Siregar, R. Y., & Pontines, V. (2018). "Exploring the Feasibility of a Common Currency in ASEAN." *Asian Economic Papers*, 17 (3).
- Tan, H. B., & Tan, K. G. (2021). "A Path towards ASEAN Monetary Integration: Political Will and Economic Alignment." *Journal of Asian Public Policy*, 14 (2).
- Thangavelu, S. M., & Chia, S. Y. (2017). "Trade and Investment Linkages in ASEAN: A Step towards a Single Currency?" *Asian-Pacific Economic Literature*, 31 (2).